

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BULETIN DWI WULAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Edisi II / 2012

"PERCEPATAN PERDA IUJK"

GLOBAL WARMING, EFEK RUMAH KACA,
MENGANCAM INDONESIA DAN DUNIA ?

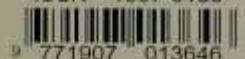
Liputan Khusus :
DARITANAH PAPUA

"SELAYANG PANDANG BALAI PELATIHAN KONSTRUKSI"

PUTUSAN NOMOR 196/G/2011/PTUN-JKT :

LPJKN 2011-2015 SAH SECARA HUKUM!

ISSN 1907-0136





Kementerian Pekerjaan Umum



Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi

*Kunjungi dan Saksikan
Puncak Acara Konstruksi Indonesia 2012*

PAMERAN KONSTRUKSI INDONESIA 2012

Parkir Timur Senayan, 29 November - 02 Desember 2012

RANGKAIAN KEGIATAN KONSTRUKSI INDONESIA 2012 :

1. Lomba Pekerja Konstruksi dan Sarasehan Pekerja Konstruksi 2012
2. Kompetisi Foto Konstruksi Indonesia
3. Lomba Jurnalistik/ Karya Tulis Media Cetak
4. Lomba Karya Tulis Ilmiah terkait Konstruksi
5. Penghargaan Karya Konstruksi
6. Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi
7. Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2012
8. Seminar dan Pameran Konstruksi Indonesia 2012

Ikuti Juga

**Jakarta Construction
Fun Bike & Fun Walk**

Parkir Timur Senayan, Minggu, 02 Desember 2012

Informasi lebih lanjut :

Sekretariat BP KONSTRUKSI

Jl. Pattimura No 20 Keb Baru Jakarta Selatan\

Tlp : (021) 7266639, Fax : (021) 727 97 848

Email : datinfo25@yahoo.com

BULETIN BADAN
PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembina/Pelindung :
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi .

Dewan Redaksi :
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Usaha & Kelembagaan;
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan
Konstruksi.

Pemimpin Umum :
Mahbullah Nurdin.

Pemimpin Redaksi :
Hambali.

Penyunting / Editor :
Kristinawati Pratiwi Hadi;
Dendy Rahadian.

Redaksi Sekretariat :
Gigih Adikusomo;
Budiasih Dyah Saraswati;
Koko Gilang Nugroho;
Anjar Pramularsi;
Maria Ulfah.

Administrasi dan Distribusi :
Nanan Abidin;
Sugeng Sunyoto;
Agus Firngadi;
Ahmad Suyaman;
Ahmad Iqbal.

Desain dan Tata Letak:
Nanang Supriyadi;
Y. Bisma Wikantya.

Fotografer :
Sri Bagus Herutomo.

Alamat Redaksi :
Jl. Pattimura No.20
Gd.Bina Marga Lt.5 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tlp/Fax. 021-72797848
E-Mail : datinfo25@yahoo.com

Salam dari redaksi

Halo para pembaca Buletin Badan Pembinaan Konstruksi, salam hangat dan bersemangat dari kami. Pertama-tama puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME, Alhamdulillah berkat anda Buletin kami mendapat respon yang positif pada penerbitan perdana edisi I bulan Januari - Februari lalu. Wujud apresiasi kami terhadap hal tersebut, kami ucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas kepedulian anda terhadap kami khususnya pada dunia jasa konstruksi di tanah air.

Pada edisi II Maret – April 2012 ini kami menghadirkan informasi penting terkait pembinaan dunia jasa konstruksi di daerah yaitu Izin Usaha Jasa Konstruksi, selain itu kami angkat informasi penting tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Jasa Konstruksi. Kami pun masih terus meng-update berita tentang LPJKN dan LPJKD, di mana ranah hukum melalui pengadilan telah banyak berbicara dan memperjelas semua, Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi, Tri Djoko Waluyo menjelaskan detailnya dalam Interview dengan kami.

Pembaca yang berbahagia, dunia sedang terancam karena pemanasan global akibat dari efek rumah kaca, bersama-sama kita harus melakukan tindakan preventif untuk mencegahnya. Pada edisi kali ini kami juga akan membawa anda untuk mengetahui Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi yang menampilkan sistem teknologi informasi yang dapat di akses oleh masyarakat luas melalui website : www.pusbinsdi.net.

Redaksi berkesempatan berkunjung ke Papua, tepatnya ke Balai Pelatihan Konstruksi, kita intip ada apa saja di sana. Lalu kita menyeberang ke Kota Bogor, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi berkesempatan meresmikan Posyandu hasil dari kegiatan tahunan Konstruksi Indonesia 2011.

Pembaca yang budiman Buletin Badan Pembinaan Konstruksi berusaha untuk memahami keingintahuan anda, semoga bermanfaat dan Selamat membaca. Salam Hangat dan Bersemangat .

_REDAKSI

Daftar Isi

► Putusan Nomor 196/g/2011/ptun-jkt : Sk Menteri Pu Nomor 223 Tahun 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lpjkn Periode 2011-2015 Sah Secara Hukum!	2
► Rakornas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	4
► Pentingnya Pemerintah Kab/Kota untuk Mempercepat Penerbitan Perda Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	7
► Keterkaitan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permen 14/2012 dengan Percepatan Penerbitan Peraturan Daerah tentang Pemberian IUJK	11
► <i>Global Warming</i> , Efek Rumah Kaca, Mengancam Indonesia dan Dunia?	12
► Dari Tanah Papua, "Selayang Pandang Balai Pelatihan Konstruksi"	15
► Sosial Konstruksi Indonesia untuk Posyandu Masyarakat Bogor	17
► Pergeseran Posisi Jabatan Dilingkungan Badan Pembinaan Konstruksi	19
► Sistem Informasi Sumber Daya Investasi	20
► Dukungan Indonesia Berupa Program Pembangunan Kapasitas bagi Palestina	22
► Indonesia Tidak Seperti Yang Saya Bayangkan!!!	24

Putusan Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT : SK Menteri PU Nomor 223 Tahun 2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus LPJKN Periode 2011-2015 **SAH SECARA HUKUM !**

Dalam membuat suatu peraturan, pemerintah selalu memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, oleh karena itu pemerintah melalui orang-orang terbaiknya berusaha melihat kepentingan rakyat yang lebih besar dibandingkan kepentingan golongan. Sebuah peraturan disusun melalui kajian dan telaah dasar hukum yang berlaku, dari hasil peraturan tersebut jika ada yang dirasakan ganjil, maka dapat dilakukan amandemen atau revisi. Juga jika ada pihak yang merasa dirugikan terhadap suatu peraturan tertentu maka, sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum, pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan melalui jalur yang seharusnya.

Itu yang terjadi terhadap Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum yang digugat oleh Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Periode 2011-2015 (Objek Sengketa).

Hasilnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT yang menyatakan bahwa Gugatan Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI), dalam hal ini diwakili oleh Ir. Manahara R. Siahaan, SH. yang menggugat Menteri Pekerjaan Umum, ditolak oleh Majelis Hakim, dalam Perkara Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT.

Lebih jauh mengenai informasi ini, berikut petikan wawancara dengan Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Tri Djoko Waluyo :

Redaksi (R): "Mohon dijelaskan lebih lanjut isi dari Putusan Perkara Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT, serta kronologisnya?"

Tri Djoko Waluyo (TDW): "Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pembacaan putusannya menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 telah memenuhi syarat-syarat kewenangan, formil/prosedur dan substansi, sehingga tidak mengandung cacat wewenang,

cacat prosedur, maupun cacat substansi. Proses pemeriksaan Perkara Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT sendiri telah berlangsung sejak bulan November 2011 sampai dikeluarkannya Putusan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT pada tanggal 2 April 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta".

R : "Apakah yang menjadi pokok gugatan dari pihak penggugat?"

TDW : "Permintaan Penggugat didasarkan pada alasan dalam menerbitkan Obyek Sengketa, Menteri Pekerjaan Umum (Tergugat) dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Profesi Jasa Konstruksi, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah mengabaikan hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi ATAKI (Penggugat)".

"Selain itu Penggugat juga meminta menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 223/KPTS/M/2011, dengan didasarkan pada kepentingan sangat mendesak yakni Penggugat beranggapan apabila Obyek Sengketa tetap dijalankan maka dikhawatirkan pengurusan akan dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga dapat merugikan pembinaan terhadap masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4



Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, khususnya Asosiasi yang telah memiliki legalitas yang sah dan kompetensi.

“Kemudian pihak penggugat juga khawatir apabila obyek-obyek Sengketa tidak ditunda atau tetap dilaksanakan maka sangat mungkin Menteri Pekerjaan Umum (Tergugat) akan mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di atasnya dalam hal pembinaan terhadap Masyarakat Jasa Konstruksi yang tergabung dalam wadah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi”.

R : apa yang akan terjadi jika gugatan dari pihak penggugat ini dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara?

TDW : “Apabila permohonan Penggugat dikabulkan baik dalam Penundaan Objek sengketa dan dalam Pokok Perkara, maka akan berdampak pada tugas-tugas LPJK khususnya dalam hal penerbitan sertifikat sebagai salah satu syaratnya dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa, serta akan mengganggu kelancaran Proses Pengadaan Konstruksi dan Proyek-proyek yang sudah dijadwalkan dalam Tahun Anggaran 2012 serta dapat mengacaukan keberadaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2011 – 2015 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengganggu stabilitas kinerja dari Menteri Pekerjaan Umum (Tergugat) ”.

R : Kami dengar telah keluar juga Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terkait dengan Gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri PU Nomor 223 Tahun 2011 ini? Bisa dijelaskan lebih lanjut?

TDW : “Memang benar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel yang menyatakan mengabulkan permohonan Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

“Pihak Penggugat disini adalah pihak yang mengaku sebagai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Masa Bakti (2011-2015) namun ditetapkan berdasarkan MUNAS yang diwakili oleh Ir. Rendy Lamadjido, MBA dan Ir. S Poltak Situmorang, SH.

“Pihak Tergugat adalah Menteri Pekerjaan Umum dalam ini memberikan kuasa kepada Tim Kuasa Hukum dari Badan Pembinaan Konstruksi dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum melalui Surat Kuasa Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SKS/M/2012 tanggal 14 Februari 2012”. “Sedangkan Para Turut Tergugat adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang dikukuhkan oleh Menteri PU pada tanggal 10 Agustus 2011 dalam hal ini menguasai kepada Firman Wijaya, SH dan Partner.

“Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan Putusan tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan yang dikeluarkan oleh Badan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“Terdapat perkara dengan objek sengketa (Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011) yang sama yaitu Perkara 196/G/2011/PTUN-JKT dan Perkara Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka ketiga perkara tersebut mempunyai Objek sengketa yang sama (Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011)”.

“Sesuai hukum acara yang berlaku dalam memeriksa perkara suatu pengadilan harus mempunyai kewenangan dalam mengadili. berdasarkan hal tersebut maka kewenangan mengadili sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam Putusan Sela Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut”.

“Penggugat beranggapan bahwa Tergugat (Menteri PU) dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi”.

R : Jika demikian, bagaimana pihak Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi gugatan tersebut?

TDW : “Sebagaimana disampaikan oleh kuasa dari Menteri Pekerjaan Umum, menanggapi gugatan dari pihak Penggugat maka : Pertama, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2012 merupakan bagian dari proses pengukuhan Pengurus LPJK Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010. “Dimana proses pemilihan dan penetapan Pengurus LPJK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24/PRT/M/2010”.

“Kedua, Menteri Pekerjaan Umum dalam mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011 sudah sesuai kewenangan yaitu melaksanakan tugas pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan, berdasarkan hal tersebut maka Menteri

Pekerjaan Umum tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga bukan Perbuatan Melawan Hukum”.

R : “Dengan telah dikeluarkannya dua Putusan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebenarnya bagaimana kedudukan dan apakah pesan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 terhadap dunia jasa konstruksi di Indonesia?

TDW : “Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang dalam Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur”.

“Tentunya keberadaan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 diperlukan untuk mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang telah dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum sebagai wadah yang resmi dalam mengeluarkan sertifikasi dibidang jasa konstruksi. Dengan demikian Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional harus tetap berjalan karena akan menetapkan pedoman pelaksanaan bagi tugas Lembaga Tingkat Provinsi tanpa adanya Pedoman pelaksanaan tersebut maka Lembaga Tingkat Provinsi tidak dapat bekerja sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan”. (TW).



RAKORNAS LEMBAGA

Saat yang dinanti-nanti bagi perkembangan jasa konstruksi di Indonesia akhirnya tiba. Pada Senin (09/04), Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di Yogyakarta. Ajang ini menjadi forum bertemunya Pengurus LPJK Nasional dan LPJK tingkat Provinsi seluruh Indonesia, untuk menyatukan pikiran dan langkah, memberikan masukan pemikiran dari seluruh LPJK dalam mempersiapkan penyusunan berbagai peraturan lembaga.

Rakornas ini juga Istimewa, karena pertama kalinya dilakukan pada tahun 2012 oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Pesertanya merupakan pengurus LPJK Nasional dan LPJK tingkat Provinsi seluruh Indonesia yang sudah dikukuhkan oleh masing-masing Gubernur, yang hingga saat Rakornas ini dilaksanakan sudah ada 29 Provinsi yang pengurus LPJKD-nya dikukuhkan oleh Gubernur masing-masing daerah.

Pada kesempatan ini Menteri Pekerjaan Umum menegaskan kembali beberapa isu terkait dengan keberadaan LPJK, serta apa yang harus dilakukan LPJK ke depan. Salah satu yang paling utama adalah isu keberadaan LPJK. “Terkait dengan keberadaan LPJK, saya tegaskan kembali bahwa LPJK yang sah



Umum Nomor 10/PRT/M/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Isu-isu lainnya terkait adanya berbagai kebijakan dan peraturan baru mengenai jasa konstruksi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja jasa konstruksi dan sekaligus untuk meningkatkan peran masyarakat jasa konstruksi. Dengan demikian sudut pandang seluruh pengurus LPJK dan pemerintah seharusnya sama dalam memaknai terbitnya berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang mengarah pada pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang lebih baik.



Pembangunan infrastruktur tersebut memainkan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Karena itu saya tegaskan kembali bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha", ujar Djoko Kirmanto.

Pemerintah sendiri akan terus berupaya untuk meningkatkan anggarannya bagi

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

menurut UUK Nomor 18/1999 itu hanya satu, yaitu yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku", tegas Djoko Kirmanto.

Sehubungan dinamika situasi saat ini, yaitu tentang isu gugatan terhadap keberadaan LPJK, pematenan logo dan merk LPJK, dan sebagainya yang berhubungan dengan aspek hukum, Djoko Kirmanto mengingatkan agar hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja LPJK. Pemerintah akan terus berupaya mengatasi permasalahan hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan perundangan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, beserta produk-produk hukum turunannya, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan

UM juga mengingatkan kepada seluruh peserta Rakornas, bahwa tugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan berbagai pembangunan konstruksi ataupun infrastruktur sesungguhnya secara tidak langsung terkait dengan tugas pokok pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.





pembangunan infrastruktur hingga mencapai 5% dari PDB (saat ini masih di bawah 5%) guna menjaga dan mendorong tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi 6% - 7% per tahun. Tentunya memerlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat termasuk salah satunya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Meski demikian, Pembangunan Infrastruktur bukan tidak pernah ada masalah. Beberapa permasalahan mendasar pembangunan infrastruktur yang erat korelasinya dengan tugas pokok dan fungsi lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, antara lain: tuntutan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia cenderung semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas; Pemerintah dan dunia usaha (masyarakat) belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran bagi pembangunan infrastruktur, disamping belum pula dapat memenuhi kebutuhan sumber daya konstruksi yang handal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur; serta tidak sebandingnya antara ketersediaan anggaran dan sumber daya konstruksi dengan tuntutan kebutuhan infrastruktur merupakan permasalahan yang sangat krusial yang harus bisa diatasi dalam waktu singkat.

"Karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut pada kesempatan ini saya minta kepada LPJK segera mengambil langkah-langkah konkrit", ujar Djoko Kirmanto. Langkah-langkah yang dimaksud antara lain:

segera mendorong program-program penelitian dan pengembangan konstruksi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan konstruksi; menggalakkan pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta/masyarakat; serta meningkatkan peran LPJK untuk menjadi lokomotif pengembangan jasa konstruksi di tingkat nasional dan daerah, khususnya untuk menangkal derasnya kehadiran penyedia jasa dan tenaga kerja konstruksi asing serta barang-barang konstruksi impor. Upaya tersebut harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi potensi dalam negeri.

Terkait dengan pelaksanaan penerbitan SBU/SKA/SKT, Menteri PU juga berpesan agar kualitas pelayanannya harus terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing

berdasarkan peraturan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat jasa konstruksi.

Mengingat Rakornas ini dilakukan paling utama untuk evaluasi, maka berdasarkan evaluasi atas hasil kerja LPJK selama ini, maupun penyusunan program kerja untuk masa-masa mendatang hendaknya dilandaskan pada filosofi bahwa ada keinginan yang kuat dari seluruh anggota LPJK untuk meningkatkan peran lembaga dalam menjembatani aspirasi masyarakat jasa konstruksi dalam pengembangan pelayanan jasa konstruksi, dan juga sekaligus untuk menjadi mitra pemerintah yang kokoh dalam mengembangkan jasa konstruksi di Indonesia.

Pada hari berikutnya, Rapat Koordinasi Nasional LPJK 2012 dilanjutkan pembahasan yang dibagi dalam beberapa Kelompok Kerja (Pokja). Pokja I membahas Konversi kualifikasi, klasifikasi, dan Sub klasifikasi serta Time Frame Penerapan PerMen 08; Pokja II membahas Rancangan Pedoman Unit Sertifikasi; sementara Pokja III membahas Program LPJKN & LPJK Provinsi, serta Organisasi & Tata Laksana.

Semoga Rakornas menjadi pintu gerbang dari awal yang baik perjalanan Pengembangan Jasa Konstruksi di Indonesia. (Tw)





Pentingnya Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Mempercepat Penerbitan Perda Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

November 2011 lalu masyarakat Indonesia dibuat tercengang dengan peristiwa runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. "Jarang ada jembatan berusia 10 tahun bisa runtuh," ungkap Djoko Kirmanto kepada wartawan di Tenggarong, saat meninjau langsung kondisi jembatan yang ambruk.

Selain itu terjadi juga kegagalan bangunan lainnya, diantaranya, "Baru Tiga bulan direnovasi, Sekolah Dasar Negeri 3 Pamarayan, Kabupaten Serang ambruk diduga akibat kontruksi atap baja yang tak sesuai bestek, Rabu (24/12)". "Atap Sekolah Dasar Negeri Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (10/1), ambruk. Insiden terjadi setelah para siswa dan guru pulang sekolah, tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, penyebab ambruknya atap diduga akibat konstruksi bangunan yang kurang sempurna". "Di Brebes, Jawa Tengah, atap dari tiga ruang kelas baru

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ketanggungan, tiba-tiba ambrol, Jumat (23/1)."

Hal di atas adalah pembelajaran untuk masyarakat Indonesia, sehingga kelak peristiwa atau kejadian seperti itu tidak terjadi lagi, atau setidaknya kejadian tersebut dapat diminimalisir.

Dalam satu kesempatan disebutkan beberapa hal yang menjadi faktor dalam kegagalan konstruksi disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan, ketika itu, Dadan Krisnandar, dibagi menjadi dua penyebab. Pertama, adanya force majeure, sebagai "keadaan memaksa" keadaan dimana seorang debitur



terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga.

Selain itu, penyebab kedua, karena kompetensi penyedia jasa yang masih kurang memadai baik itu dari segi perencanaan atau pelaksanaan. Dari faktor terakhir tersebut memunculkan pertanyaan, apakah kegagalan konstruksi karena kurangnya dukungan regulasi ? apakah terdapat kurangnya kinerja tim pembina jasa konstruksi ? apakah izin usaha jasa konstruksi (IUJK) sudah benar sebagai filter ? dari ketiga pertanyaan di atas berlanjut dengan melihat dari sisi Peranan tim pembina jasa konstruksi yang melakukan fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap penyedia jasa konstruksi nasional.

IUJK berfungsi sebagai penyaring melalui fungsi pengawasan usaha jasa konstruksi sebagai mana mestinya, dimana hal tersebut dilakukan dengan proses pemberian IUJK, yang langkah-langkahnya merupakan sebuah proses verifikasi dan validasi kemampuan dan integritas Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) nasional. BUJK yang memiliki kemampuan dengan mengantongi IUJK berhak untuk mengerjakan proses konstruksi, dan menghasilkan konstruksi yang sesuai. Hal ini pula yang menunjukkan bahwa penerbitan IUJK bukan hanya pelayanan administrasi belaka.

Dari pemaparan di atas banyak hal yang dilakukan Pemerintah termasuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang dilakukan pusat kepada pemerintah Prov/Kab/Kota yang salah satunya melalui upaya percepatan penerbitan Peraturan Daerah tentang Pemberian IUJK oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengapa Penerbitan IUJK harus dipercepat ?
Dari data per bulan Februari 2012 hanya sekitar 30% kabupaten/kota yang memiliki Peraturan Daerah Tentang Pemberian IUJK. Dari jumlah Peraturan Daerah IUJK tersebut semuanya berujung pada adanya retribusi dalam



memberikan layanannya, padahal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa pelayanan pemberian IUJK bukan masuk ke dalam layanan retribusi.

Disisi lain, penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah Pusat sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.

Hal ini dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan

pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Salah satu amanat dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah dalam rangka pembinaan Jasa Konstruksi, pemerintah kabupaten/kota melakukan penerbitan izin usaha jasa konstruksi.

Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum melalui Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan melakukan Bimbingan Teknis Percepatan Penerbitan Peraturan Daerah tentang Pemberian IUJK, dengan tujuan meningkatkan pemahaman pemerintah/kabupaten kota tentang pentingnya penerbitan Peraturan

Manfaat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Penyedia Jasa	Pengguna Jasa	Masyarakat	Pemerintah
<ul style="list-style-type: none"> • Legalitas usaha • Dapat melakukan pekerjaan konstruksi di seluruh Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan kompetensi • Jaminan Proses dan produk konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi kepentingan masyarakat terhadap kegagalan bangunan dan/atau kegagalan konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin hanya BUJK yang mampu saja yang mendapat IUJK • Alat Pembinaan • Mengendalikan akses pasar industri konstruksi • Mengendalikan kinerja BUJK • Mengendalikan kinerja LPJK

Proses Perizinan harus diarahkan untuk mencapai manfaat-manfaat tersebut



Daerah tentang Pemberian IUJK sebagai salah satu pondasi pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten/Kota.

Substansi lain yang juga penting dalam Peraturan Menteri ini antara lain adalah ditegaskannya hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik hak dan kewajiban bagi badan usaha jasa konstruksi maupun hak dan kewajiban pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak yang memberikan IUJK.

Hal tersebut diketahui agar semua pihak menyadari bahwa pemberian IUJK tidak hanya sekedar formalitas melaksanakan amanat undang-undang belaka, namun "kunci" untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga instrumen penting bagi pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah kabupaten/kota.

Ke depan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti Peraturan Menteri ini dengan melakukan langkah-langkah nyata untuk mempercepat terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pemberian IUJK. Hal ini menjadi penting karena

pemberian IUJK harus didasari dengan suatu landasan hukum di daerah yang kuat dan jelas dalam hal ini adalah Peraturan Daerah.

Draft Raperda tentang IUJK berdasar PERMEN 04/2011

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) berlaku secara Nasional, sementara dasar penerbitan IUJK adalah Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Hal ini memungkinkan

yang bisa dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang IUJK, Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pembinaan Konstruksi telah mempersiapkan contoh (tipikal) Rancangan Peraturan Daerah tentang IUJK dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2011. Contoh Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pemberian IUJK dengan tetap

Peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan jakons

	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Penyedia Jasa	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi Menyebarkan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerja jasa konstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi Menyebarkan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerja jasa konstruksi
Pengguna Jasa	-	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat Menyebarkan ketentuan perizinan pembangunan Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

terjadinya perbedaan pengaturan untuk substansi yang sama, misalnya pengaturan mengenai persyaratan permohonan izin dan pengenaan sanksi.

Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut dan mengingat bahwa sebenarnya tidak banyak muatan lokal

mengakomodasi keunikan di masing-masing daerah.

Kementerian Dalam Negeri melalui Sub Direktorat UPD I/5 Direktorat Urusan Pemerintah Daerah I, memberikan saran kepada daerah yang patut diketahui terkait substansi dari Permen PU Nomor 04/2011 tentang pedoman persyaratan pemberian IUJK Nasional yang memiliki lingkup, diantaranya : wewenang pemberian IUJK, Persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha orang perseorangan, Jangka Waktu dan Wilayah operasi IUJK, Hak & Kewajiban, Laporan, Pengawasan & Pemberdayaan, yang kesemuanya itu harus dijadikan acuan Pemda Kab/Kota dalam Penyusunan Peraturan Daerah IUJK, atas dasar untuk melindungi kepentingan masyarakat dan wujud tanggung jawab pembinaan bidang jasa konstruksi.

Persyaratan Ijin Baru dan Perpanjangan

	Permohonan Ijin Baru	Perpanjangan Ijin
Formulir Permohonan	✓	✓
SBU	✓	✓
SKA/SKT	✓	✓
Kartu PJT-BU*	✓	✓
Bukti PPh atas kontrak		✓

Kartu PJT-BU:

- disertai surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJT-BU)
- Perlu diatur lebih lanjut dalam Perda (mekanisme pemberian kartu, format, dll)

Berikut adalah pokok-pokok substansi yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah, diantaranya :

- IUJK diberikan oleh Pemda tempat Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) berdomisili, Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati/Walikota.
- Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU (klasifikasi Kecil, Menengah, Besar dan kualifikasi arsitektur, sipil, mekanik, elektrik dan tata lingkungan).
- Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin, Nomor kode izin akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan diberikan Kartu Tanda Daftar, tidak memungut retribusi.
- Masa berlaku IUJK 3 (tiga) tahun, IUJK berlaku di seluruh Indonesia. (dnd)



Sekilas Tentang UU Pajak Daerah dan Retribusi

Beberapa perundang-undangan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah telah mengalami beberapa perubahan diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Perubahan UU tersebut di maksud dalam kerangka : penyempurnaan sistem pemungutan pajak & retribusi daerah, *local taxing empowerment*, & peningkatan efektifitas pengawasan.

Undang-undang ini menyempurnakan kebijakan retribusi. "Di dalam UU ini memperluas kewenangan retribusi dengan memperluas jenis retribusi baru dan penetapan tarif, UU ini pun mengatur pemangkasan terhadap jenis retribusi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (menghambat mobilitas Penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor), selain itu Undang Undang ini memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif retribusi dan mengandung penetapan sanksi yang lebih tegas serta UU ini mengatur mekanisme pengawasan dari represif menjadi preventif ; dan UU ini pun mengatur peluang untuk membuat retribusi yang sudah ditetapkan UU dengan melalui penetapan PP (tentang jenis-jenis retribusi tambahan)" demikian disampaikan Kepala Sub Direktorat UPD I/5 Direktorat Urusan Pemerintah Daerah I, Kemendagri, Nyoto Suwignyo.

Jenis Retribusi

Selain itu Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah nomor 28 tahun 2009 ini pun disebutkan bahwa yang termasuk Pajak Daerah diantaranya dibagi menurut wilayahnya yaitu, pertama, Pajak Provinsi, dan, kedua, Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi diantaranya : Pajak Kendaraan Bermotor, Balik nama Kendaraan bermotor, Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Air Permukaan, Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota, diantaranya : hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Sedangkan yang termasuk Retribusi Daerah di kelompokkan dalam 3 (tiga) hal diantaranya Retribusi Daerah Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan tertentu. Yang termasuk Jasa Umum diantaranya : Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Sampah/Kebersihan, Penggantian Biaya Cetak KTP & Akta Capil, Pemakaman & Pengabuan mayat, Parkir Tepi Jalan umum, Pasar, Pengujian Kendaraan bermotor, Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan / sedot Kakus, Pengolahan Limbah cair, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pelayanan Pendidikan, Pengendalian Menara Telekom.

Yang termasuk golongan Retribusi Daerah Jasa Usaha diantaranya : Pemakaian Kekayaan daerah, Pasar Grosir / Pertokoan, Tempat Pelelangan, Terminal, Tempat parkir Khusus, Tempat Penginapan, Rumah Potong Hewan, Pelayanan Kepelabuhan, Rekreasi dan Olah raga, Penyeberangan di air, Penjualan Produksi Usaha daerah. Sementara itu yang termasuk Retribusi Daerah perizinan tertentu diantaranya : IMB (izin mendirikan bangunan), Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin gangguan, Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan. (dnd)

Keterkaitan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permen 14/2012 dengan Percepatan Penerbitan Peraturan Daerah tentang Pemberian IUJK.

Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berimbas pada bidang jasa konstruksi yang harus memiliki standar layanan minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang jasa konstruksi ini diantaranya : berkaitan dengan waktu pemberian IUJK dan ketersediaan sistem informasi jasa konstruksi.

Dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat tahun 2014 diseluruh kabupaten/kota diharapkan sudah dapat memberikan layanan penerbitan IUJK.

Diperlukan komitmen dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota agar target pencapaian SPM yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri ini dapat tercapai paling lambat tahun 2014.

Kaitan SPM dengan Penerbitan IUJK Layanan minimal waktu pemberian IUJK tidak mungkin dapat tercapai pada tahun 2014 harus didahului dengan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pemberian IUJK, dengan kondisi tersebut di atas sangatlah mendesak untuk mempercepat penerbitan Peraturan Daerah tentang pemberian IUJK.

SPM Bidang Jasa Konstruksi, dinilai dari 2 (dua) indikator. Pertama, terkait sistem informasi jasa konstruksi, dimana tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun, dengan target layanan minimal sistem informasi jasa konstruksi tercapai 100 persen pada tahun 2014. Kedua, Izin Usaha Jasa Konstruksi, dimana IUJK

terbit dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap, dimana target layanan minimal IUJK tercapai 100% pada tahun 2014.

Kemendagri memberikan rencana pencapaian SPM untuk daerah, PERTAMA, Indikator & target SPM telah dituangkan dalam Dokumen Perencanaan & Penganggaran Daerah, KEDUA, Memastikan pembiayaan SPM dituangkan dalam dokumen perencanaan & anggaran telah melalui perhitungan pembiayaan, KETIGA, Pencapaian Kinerja Penerapan SPM telah dapat diukur & dilaporkan kepada Pemerintah melalui mekanisme LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) & dapat dijadikan sebagai input dalam EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), KEEMPAT, terbangunnya sistem informasi data base profil pelayanan dasar yang dapat diakses oleh K/L maupun pemda dalam perumusan kebijakan perencanaan & penganggaran terkait dengan SPM.

Langkah percepatan SPM di daerah tertuang dalam Surat Edaran Mendagri No. 100/676/SE tanggal 7 Maret 2011, dengan penjelasan isi : Menjadikan SPM sebagai acuan dalam dokumentasi perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan tujuan untuk menjamin optimalisasi penerapan & pencapaian indikator SPM dimaksud. Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Permen/Kepala LPNK dimaksud. Rencana Pencapaian SPM tersebut, perlu disinkronkan & diintegrasikan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) & Renstra (Rencana Strategis) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana kerja SKPD, KUA (Kebijakan Umum Anggaran), RKA-SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (dnd)

LANGKAH PERCEPATAN PENERAPAN SPM KHUSUS JASA KONSTRUKSI UNTUK PENERBITAN IUJK

1. Membentuk Perangkat Utama:
 - Tim Pelaksana IUJK (melalui SK Bupati)
 - Perda tentang IUJK
2. Menyusun SOP untuk alur proses penerbitan IUJK.
3. Penganggaran biaya operasional penerbitan IUJK
4. Sosialisasi target SPM IUJK, PERDA IUJK, serta SOP alur proses penerbitan IUJK.
5. Pengawasan penerbitan IUJK oleh inspektorat
6. Evaluasi secara periodik terhadap pencapaian target SPM penerbitan IUJK.

GLOBAL WARMING, EFEK RUMAH KACA, MENGANCAM INDONESIA DAN DUNIA ?

Apakah anda pernah mendengar bahwa suatu saat nanti Indonesia yang memiliki ribuan pulau, sebagian pulaunya akan tenggelam, mengapa? hal ini disebabkan karena mencairnya es di kutub utara, yang mengakibatkan air laut bertambah tinggi hingga mencapai 7 meter. Kelak kabarnya?!! Jakarta pun akan tenggelam. *Wallaahualam.*

Gambaran di atas disebutkan oleh pengamat karena efek rumah kaca. Efek rumah kaca inilah sebagai salah satu penyebab *Global Warming* atau pemanasan global.

Penjuru Indonesia bahkan Seluruh Dunia, beberapa tahun belakangan ini familiar dengan istilah Pemanasan global atau *Global Warming*. Pemanasan global merupakan proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan

menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya *gletser*, dan punahnya berbagai jenis hewan.

Dari deskripsi di atas, satu hal yang harus tetap kita tanamkan sebagai mahluk Tuhan yaitu rasa optimis. Ada yang mengatakan bahwa setiap penyakit yang ada di dunia ini bisa kita cegah atau setidaknya dapat kita obati, begitupun dengan Pemanasan Global, pemanasan global janganlah terus menerus menjadi sumber ketakutan, namun dengan tindakan bersama-sama *global warming* bisa kita cegah.

Bagaimana dengan di Indonesia? Melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah ditetapkan target penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2020 sebesar 26 % dengan pendanaan sendiri, dan 41 % apabila memperoleh bantuan dari luar negeri. Target ini menjadi beban sektor PU melalui penanganan sampah dan limbah dengan target pengurangan emisi sampai dengan tahun 2020 sekitar 48 juta CO2 dengan dana lokal, dan 78 juta ton CO2 dengan dana Internasional.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PU berkomitmen untuk lebih membumikan gagasan-gagasan yang dinilai baik dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat atas isu global yang mengancam kehidupan rakyatnya. Kita semua harus peduli mengingat akibat pemanasan global telah merubah wajah dunia dan memberi efek yang

cenderung buruk bagi kehidupan manusia ujar Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.

Emisi didefinisikan sebagai zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Fakta yang dicatat oleh *European Commission* (Komisi Eropa), bangunan gedung mengkonsumsi sekitar 30 % sampai 40 % energi primer dunia, dan berkontribusi sebesar 24 % terhadap emisi gas rumah kaca di dunia.

Isu pemanasan global dapat mempengaruhi ketahanan pangan kita, ini tentu tidak dapat dianggap sepele. Kita sempat merasakan tingginya curah hujan dalam durasi yang tidak sebentar lalu timbul banjir. Kemarau yang berkepanjangan sehingga terjadi kekeringan ekstrim. Dalam 40 tahun terakhir Permukaan air laut telah meningkat setinggi 1,8 mm yang membawa konsekuensi terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, yang dapat tergerus karena naiknya permukaan air laut, selain itu pulau kecil dapat hilang tenggelam di masa yang akan datang. Hasil penelitian memprediksi bahwa kenaikan suhu muka bumi sebesar 4 °C akan memberikan dampak negatif terhadap



industri perikanan dan akuakultur di Indonesia.

Bagaimana Pencegahannya?

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka melakukan mitigasi dan mengadaptasi dampak dari perubahan iklim dan permasalahan-permasalahan terkait. Konsep-konsep ramah lingkungan, seperti halnya ekonomi dan infrastruktur hijau, semuanya diarahkan

untuk mencapai tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya memiliki peran yang amat penting dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca, ada beberapa hal krusial yang bisa dilaksanakan oleh Kementerian PU dan masyarakat Indonesia pada umumnya, "diantaranya

3 (tiga) Hal Penting yang ditekankan Menteri Pekerjaan Umum terkait penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan **Carbon Development Mechanism (CDM)**

1. Peningkatan kesadaran dan kapasitas para perencana dan pengelola proyek terhadap pentingnya menerapkan konsep hijau dalam pembangunan gedung dan infrastruktur ke PU an,
2. Perlu disusun roadmap potensi penerapan CDM dalam proyek-proyek di sektor Pekerjaan Umum guna memanfaatkan semaksimal mungkin potensi proyek-proyek CDM yang ditawarkan di pasar global.
3. Penyediaan dukungan sistem informasi untuk proyek-proyek terkait CDM guna koordinasi dan penyebarluasan informasi.

(*disampaikan pada pembukaan sosialisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di sektor Pekerjaan Umum)

melakukan pengurangan emisi dan peningkatan kapasitas penyerapan emisi. Pengurangan emisi bisa dilakukan dengan menghemat listrik, jangan membuka lahan gambut, pengurangan penggunaan bahan bakar yang tidak bisa diperbarui. Sedangkan Peningkatan kapasitas penyerapan emisi, bisa dilakukan dengan melaksanakan program yang dicanangkan Presiden RI, yaitu melakukan penanaman 1 Milyar pohon tiap tahun, dan melakukan penegakan regulasi untuk mewujudkan *green city* dan *green building*," Ungkap Djoko Kirmanto.

Sementara itu, usaha lain yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pembinaan Konstruksi yakni melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Pekerjaan Umum dengan Pemanfaatan *Certified Emission Reduction* (CER) melalui *Clean Development Mechanism* pada Pembangunan-pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Usaha-usaha tersebut bukan tanpa kendala, masalah pembiayaan disebut sebagai salah satu penghambat dalam upaya pengurangan emisi CO2 ini. Salah satu cara mengatasi hal tersebut diantaranya adalah melalui potensi penghasilan dari penjualan sertifikat

penurunan emisi (*Certified Emission Reduction/ CER*) melalui *Carbon Development Mechanism* (CDM). Dengan demikian diharapkan sebagian dari biaya investasi dapat ditutupi dari hasil penjualan sertifikat tersebut.

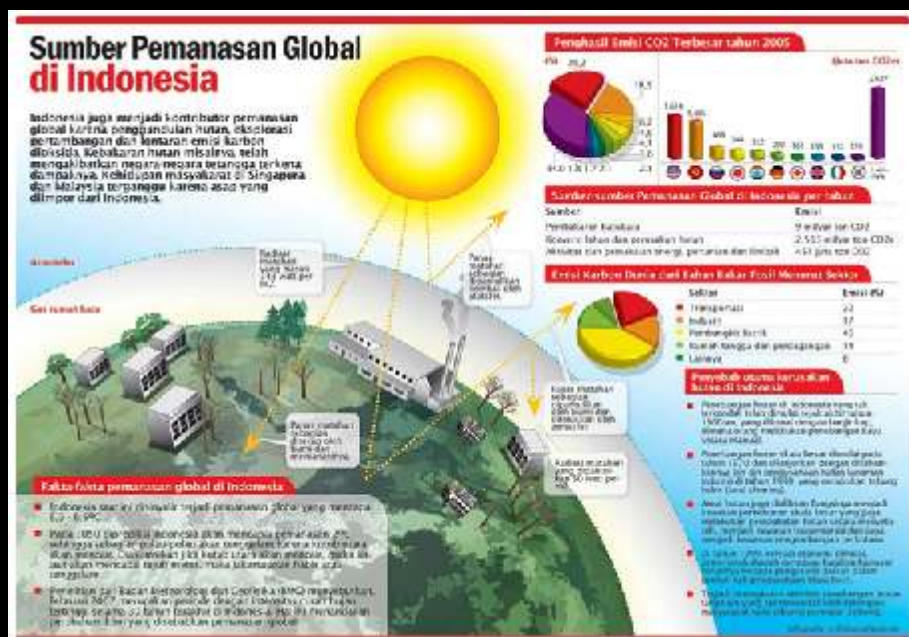
Keuntungan CDM (Carbon Development Mechanism) :

1. Menghasilkan proyek yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan diterbitkannya sertifikat pengurangan emisi (*Certified Emission Reductions-CERs*) oleh Badan Eksekutif CDM terhadap suatu proyek, negara bisa mendapatkan investasi baru untuk melakukan kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK.
2. Mendapatkan keuntungan berupa transfer teknologi dan dana tambahan yang dapat membantu untuk mempersiapkan diri menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim.

(*disampaikan pada pembukaan sosialisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di sektor Pekerjaan Umum)

Potensi Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari CDM Protokol Kyoto telah dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang melakukan analisis, diantaranya terhadap pertumbuhan konsumsi energi Indonesia, pangsa Indonesia dalam pasar karbon dunia, serta potensi Indonesia dalam melakukan proyek-proyek CDM.

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki potensi untuk melakukan perdagangan karbon (*carbon trading*), bukan hanya dari penanganan sampah dan limbah, namun juga misalnya dari peningkatan persentase ruang terbuka hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya; pewujudan *ecocity*, penerapan konsep konstruksi berkelanjutan; pembangunan *green building* dan *green road*, serta pemanfaatan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air dalam pengelolaan Sumber Daya Air. (dnd) .





DARI TANAH PAPUA "SELAYANG PANDANG BALAI PELATIHAN KONSTRUKSI"

Pagi sekali saya sudah harus berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta, pukul 04.00 wib sudah harus *check in*, karena pesawat paling pagi keberangkatan ke tempat yang menjadi destinasi sudah harus tinggal landas pada pukul 05.00 wib dari Jakarta.

Pesawat tidak langsung terbang menuju tempat tujuan, 3 jam berlalu, pesawat transit kurang lebih 30-60 menit di Sulawesi Selatan, Makassar untuk mengangkut penumpang dan perjalanan dimulai lagi selama 3 jam kedepan. Tak terasa jika di total, perjalanan ditempuh dalam waktu 7 jam, maka sampailah kami di Bandar Udara Sentani, Jayapura, Papua.

Menuju tanah Papua berarti kita akan mengunjungi sebuah provinsi terluas Indonesia dengan luas 420.540 km². Pulau Papua dibagi menjadi dua provinsi, bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Papua Barat.

Perbatasan Provinsi Papua di sebelah utara berbatasan dengan Samudera

Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, dan Australia, sebelah barat berbatasan dengan Papua Barat dan Kepulauan Maluku sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini.

Banyak hal yang bisa digali di Provinsi Papua untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut salah satunya dari objek pariwisata. Salah seorang Pejabat dari Dinas Provinsi mengakui kesulitan untuk mempromosikan karena letak geografisnya yang sulit dijangkau dan belum maksimalnya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana berupa jalan maupun tempat penginapan di areal wisata serta belum adanya sarana akomodasi memadai menuju obyek wisata itu.

Sejalan dengan kondisi tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto mengatakan bahwa wilayah Timur Indonesia menjadi prioritas untuk program dengan pendanaan sisa anggaran lebih (SAL) 2011. Di antaranya

adalah Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. Hal tersebut didukung dengan instruksi Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono. Hal ini mengingat, pembangunan infrastruktur khususnya ke-PU-an sangat dibutuhkan di wilayah timur seperti akses jalan dan membuka daerah terisolasi.

Sementara itu untuk membangun sebuah kawasan tentunya dibutuhkan para pekerja yang terampil, terlatih dan profesional yang berdisiplin tinggi. Idealnya akan lebih cocok pekerja tersebut berasal dari wilayah dimana pembangunan itu dilakukan, sesuai prinsip ekonomis, agar lebih efektif dan efisien, dari pada harus mengirimkan pekerja / tukang konstruksi dari pulau lain.

Menjadi tugas dan tanggungjawab negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Badan Pembinaan Konstruksi, yang memiliki Balai Pelatihan di Papua di bawah Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (Pusbin KPK) untuk menyediakan SDM (sumber daya

manusia) pekerja konstruksi yang terampil dan terlatih untuk dapat membangun diberbagai wilayah yang tersebar di penjuru timur Indonesia.

Tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh perpanjangan-tangannya di Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah V Papua. Balai ini memiliki wilayah kerja di 4 (empat) provinsi meliputi provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat melaksanakan tugas berupa bimbingan teknis, perencanaan dan menyelenggarakan Pelatihan di Bidang Konstruksi dan Sertifikasi Uji Kompetensi Keterampilan Tenaga Kerja di Bidang Konstruksi. Berfungsi melakukan penyusunan program kerja, menyelenggarakan Pelatihan dan Uji, melakukan sertifikasi, pelaksanaan urusan administrasi pelatihan, Pelaksanaan urusan ketata usahaan dan rumah tangga, pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik Negara, terwujudnya Lembaga Pelatihan Profesional guna menciptakan tenaga kerja konstruksi kompeten yang berdaya saing tinggi.

Dengan beralamat di Jl. Raya Abepura, Kotaraja - Jayapura Papua, balai ini melakukan berbagai jenis pelatihan seperti pelatihan : Pelaksana Irigasi, Pelaksana gedung, Pelaksana Jembatan, Teknik laboratorium, Tukang Pemula, Pelatihan Irigasi, Pelatihan Jalan, dan Pelatihan Gedung. Balai inipun melakukan pengujian berupa Uji Tukang Konstruksi, Uji Ketrampilan Mandor (PU), Uji Mandor Konstruksi. Selain itu diharapkan dari pelatihan ini para lulusannya diharapkan mampu menjadi Asesor, pekerja yang skill full dan terlatih terampil dan professional.

Balai ini dilengkapi fasilitas ruang belajar mengajar yang terdiri 4 ruang kelas yang dapat diisisebanyak 30 orang. Fasilitas pendukung lainnya berupa laboratorium bengkel seperti Bengkel Pembesian/Las, Bengkel Kayu, Bengkel Batu, juga dilengkapi Peralatan bengkel, seperti : Bor Freez, Bor Duduk, Mesin Genset, Gurinda Duduk, Mesin Bubut, Las Gas, Bor Duduk, Meja Kerja Kayu, Meja Kerja Mesin, Compressor.

Cukup lengkap bukan? Untuk itu mari kita bersama memanfaatkan fasilitas tersebut, sehingga Indonesia kelak memiliki pekerja konstruksi yang handal khususnya di wilayah timur Indonesia, serta target Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) dapat terwujud dengan Pelatihan dan Uji Kompetensi yang diselenggarakan berdasar pada Standar Kompetensi Kerja (SKK).

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah V Papua Jl. Raya Abepura Kotaraja Jayapura Papua Tlp/Fax. 0967 586320 / 586324 Jayapura Utara Papua. (dnd)





SUMBANGAN DAN SOSIAL KONSTRUKSI INDONESIA UNTUK POSYANDU MASYARAKAT BOGOR

Masyarakat Indonesia selaku penikmat langsung hasil pembangunan sudah ada, sewajarnya ingin selalu mendapatkan layanan fasilitas infrastruktur terbaik yang disediakan oleh Eksekutif. Pemerintah selalu berupaya untuk membentuk citra positif kepada rakyatnya di mata masyarakat Indonesia bahwa hasil pajak yang telah dibayar oleh masyarakat Indonesia kepada Negara, sebanding atau bahkan melebihi ekspektasi dengan apa yang seharusnya rakyat terima. Alhamdulillah hingga saat ini masyarakat Indonesia masih menaruh

harapan besar terhadap kinerja para aparatur negara ke depan untuk menjadikan Negara ini lebih baik, sejahtera, makmur dan berkeadilan.



Masyarakat sebagai koloni yang menduduki sebuah wilayah memiliki kebiasaan atau habitually yang berbeda satu sama lain, kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan biasanya akan menjadi adat istiadat, ada adat yang dianggap oleh masyarakat sekarang sebagai penilaian negatif yang sudah tidak relevan dengan kemajuan jaman, namun ada juga adat yang saat ini masih dianggap positif atau relevan oleh masyarakat kita, namun pada hakekatnya kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dari interaksi antara sesama anggota masyarakat tersebut dapat menanamkan jiwa sosial satu sama lain, yakni perasaan satu, saling membantu, bekerja sama, untuk satu tujuan.

Jiwa sosial ini terus menerus di pupuk oleh masyarakat Indonesia demi satu tujuan, termasuk dari unsur pemerintahan. Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, memiliki sebuah momentum yang tepat dalam rangkaian Konstruksi Indonesia 2011. Konstruksi Indonesia tahun 2011 telah berlalu, 3 Desember 2011 bertepatan dengan hari bakti PU, Menteri Pekerjaan Umum memberikan penghargaan kepada masyarakat konstruksi yang memiliki kepedulian khusus terhadap kemajuan dunia jasa konstruksi Indonesia. Konstruksi Indonesia adalah sebuah ajang nasional yang dijadikan sebagai momentum pengapresiasian masyarakat konstruksi Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, yang manfaatnya insya Allah dapat dirasakan langsung oleh para pemangku kepentingan khususnya para penyedia jasa, pengguna jasa, dan utamanya masyarakat Indonesia pada umumnya.

Salah satu bidang kegiatan Konstruksi Indonesia 2011 yaitu Lomba Tukang Konstruksi yang merupakan sebuah ajang kompetisi yang memberikan akses yang seluas-luasnya kepada para pelaksana pekerjaan konstruksi untuk memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi. Bagi sebagian orang profesi tukang dianggap "kecil" namun sadarkah, tanpa mereka tak akan ada peradaban, tak ada sejarah bukti kehidupan, tanpa mereka tak akan ada pembangunan, tak akan ada gedung tempat kita bekerja. Untuk



itu Badan Pembinaan Konstruksi sangat *concern* terhadap para pekerja konstruksi yang layak dianggap spesial.

Keseriusan akan tanggungjawab tersebut datang bukan hanya dari pihak Pemerintah saja, perusahaan seperti PT. Semen Gresik pun ikut *concern* terhadap pembinaan kepada para pekerja Konstruksi yang keberadaannya terus menerus dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia. Bidang lomba yang terselenggara dalam rangkaian Konstruksi Indonesia ini termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan Badan Pembinaan Konstruksi melalui Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Dari hasil bidang lomba pekerja konstruksi ini berhasil dikumpulkan dana sumbangan dari Badan Pembinaan Konstruksi dan sponsor untuk berbagi kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, yaitu pembangunan sebuah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang diberi nama "Anggrek", pada Maret lalu.

Terbangunnya Posyandu Anggrek merupakan sesuatu hal yang baru oleh

Kementerian Pekerjaan Umum, sekaligus menjadi wujud kepedulian karena jasa konstruksi pun dapat berguna langsung bagi kehidupan sosial masyarakat dalam hal ini oleh ibu-ibu warga sekitar dapat menjadikan tempat yang positif untuk berinteraksi memeriksakan kesehatan anak-anak, manula untuk kesehatan masyarakat setempat.

Posyandu Anggrek berdiri di atas lahan seluas 6,20 X 5 M2 yang berasal dari

**“ Pembangunan
posyandu ini
dibangun oleh para
pekerja konstruksi
yang bersertifikat dan
memiliki Surat IMB
yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota
Bogor ”**

swadaya masyarakat, dengan memanfaatkan material hasil lomba Tukang, Mandor, dan Operator Alat-alat Berat Tingkat Nasional dalam rangka Konstruksi Indonesia 2011. Pembangunannya membutuhkan waktu 21 hari sejak 13 Februari 2012 dan selesai pada 21 Februari 2012 oleh para pekerja konstruksi yang bersertifikat. Pada saat pembangunannya posyandu ini sudah memiliki Surat IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Mungkin posyandu ini satu-satunya dari 26.000 posyandu diseluruh Indonesia, yang mempunyai ijin bangunan”, ujar Bambang Goeritno. Dan lebih dari itu, menurut Kepala BP Konstruksi, hal tersebut mengisyaratkan bahwa tenaga kerja konstruksi Indonesia sudah banyak yang terampil dan siap bersaing. Hal senada juga disampaikan Walikota Bogor yang diwakili Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan Pemerintah Kota Bogor, Edgar Suratman. “Dari sekitar 921 Posyandu yang ada di wilayah Kota Bogor, mungkin baru Posyandu Anggrek ini yang berstatus 'jelas' dan 'megah' karena dibangun sungguh-sungguh”, ungkap Edgar.

Dengan keberadaan Posyandu Anggrek ini diharapkan masyarakat dapat turut aktif memanfaatkannya. Dengan demikian kesadaran terhadap kehidupan sehat, dan kesehatan fisik masyarakat terutama ibu, anak, dan manula dapat meningkat. Sekaligus meminimalisir kekhawatiran kita akan tingginya angka kematian ibu dan anak.

Di kemudian hari, Posyandu Anggrek akan menjadi model pada pelatihan-pelatihan konstruksi ataupun Sertifikasi tenaga kerja konstruksi, agar dalam ujian prakteknya dapat mewujudkan sebuah bangunan yang bermanfaat, seperti posyandu, mushola, pos hansip, jembatan-jembatan kecil, dan lain-lain. Sesuai peresmian diberikan santunan kepada 25 anak yatim/piatu dari wilayah Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. (dnd)



PERGESERAN POSISI JABATAN Di Lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi

Jajaran Eselon II dan III di Lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi melakukan serah terima jabatan menindaklanjuti pelantikan pejabat di Lingkungan Kementerian PU oleh Menteri Pekerjaan Umum pada 22 Maret lalu. Serah terima jabatan yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi ini, diantaranya serah terima jabatan antara Pejabat setingkat Eselon II, yaitu Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Krisnandar sekarang dijabat oleh Ismono, sedangkan pejabat sebelumnya kini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Terkait serah terima jabatan ini Kepala BP Konstruksi mengharapkan seluruh jajaran Badan Pembinaan Konstruksi mampu mendukung penuh program-program Pembangunan Infrastruktur yang dicanangkan Kementerian PU. "Kita tahu tanggungjawab Kementerian PU di tahun-tahun mendatang semakin berat, jadi wajib bagi kita untuk bekerja semakin keras mendukung pengembangan dan pembinaan jasa konstruksi", ujar Bambang Goeritno. Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian tanggungjawab pembinaan

jasa konstruksi tersebut antara lain kebijakan pemerintah yang mensiasati krisis bahan bakar minyak yang akan terjadi, diharapkan BP Konstruksi dapat menginformasikan terkait harga Material dan Peralatan Konstruksi apabila memang terjadi kenaikan harga atau bahkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Penyediaan tenaga kerja berkompeten bidang konstruksi juga tidak henti harus terus dilakukan. Pelatihan-pelatihan baik untuk tenaga terampil dan ahli dimaksimalkan, terutama oleh Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (PusbinkPKP). Sedangkan peran-peran bagian lain, tetap sangat diharapkan untuk mendukung kemajuan sektor jasa konstruksi.

Sementara itu, berikut nama pejabat lain di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi yang diserahterimakan jabatannya diantaranya di tingkat Eselon III, Yuni Erni Aguslin menjabat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian, Ortala dan Hukum Sekretariat BP Konstruksi menggantikan Gunawan yang kini menjabat Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi.

Hasan Basri menjabat sebagai Kepala Bidang Administrasi Kontrak Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi menggantikan Rochadi Masyhadi yang telah memasuki masa pensiun; Savitri Rusdyanti menjabat sebagai Kepala Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi menggantikan Jojo Bagio Nugraha yang telah memasuki masa pensiun; Hasto Agoeng Sapoetro menjabat sebagai Kepala Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi menggantikan Krisna Nur Miradi yang beralih tugas ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ati Nurzamiati Hazar Zubir menjabat sebagai Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi menggantikan Aca Ditamihardja yang telah memasuki masa pensiun; Amir Hamzah menjabat sebagai Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II Surabaya menggantikan Hasto Agoeng Sapoetro; dan Bambang Irawan menjabat sebagai Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III Banjarmasin menggantikan Al-Ansyori yang beralih tugas sebagai Kepala Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual Pusat Komunikasi Publik. (Tw)



SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA INVESTASI

Di era globalisasi ini, ketersediaan informasi yang cepat, tepat dan akurat mutlak diperlukan. Hanya mereka yang menguasai informasi atau yang memiliki akses informasi, yang mampu memenangkan persaingan di bidangnya. Begitu juga di sektor konstruksi, informasi yang terkait ketersediaan material dan peralatan sangat dibutuhkan. Tidak lain agar pelaku jasa konstruksi nasional dapat bersaing dengan pelaku jasa konstruksi asing. Karenanya kemudahan dalam mengakses data dalam waktu yang cepat sangat dibutuhkan dalam bisnis jasa konstruksi.

Patut diakui bahwa selama ini informasi keberadaan material dan peralatan serta pasar dan daya saing konstruksi lebih banyak dilakukan dari mulut ke mulut. Padahal ketersediaan material dan peralatan serta pasar dan daya saing konstruksi mutlak diperlukan oleh penyedia jasa konstruksi untuk

membantu menyelesaikan pekerjaannya.

Pemerintah sendiri, selaku pembuat kebijakan, sangat memerlukan data mengenai material dan peralatan konstruksi, terutama untuk memberikan panduan tentang proyeksi besaran pembangunan, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Serta sebagai bahan pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan/kebijakan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan informasi yang komprehensif, dapat dipercaya dan real-time, diantaranya tentang material, pasar konstruksi, teknologi, peralatan, dana, dan badan usaha penyedia jasa konstruksi nasional. Ketersediaan informasi tersebut sangat bermanfaat bagi penyedia material, peralatan dan jasa konstruksi dalam penyusunan rencana usaha mereka. Pada akhirnya

ketersediaan informasi yang kredibel akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Mencoba menjawab kebutuhan tersebut, Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (Pusbin SDI) sebagai unit eselon II baru dilingkungan Badan pembinaan Konstruksi saat ini tengah mengembangkan basis data dan mengkaji kebutuhan dan ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi sebagaimana diharapkan pada uraian sebelumnya.

Saat ini Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi, khususnya di Balai Sumber Daya Investasi sedang menyempurnakan sebuah website sistem informasi yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Investasi (SISDI). SISDI adalah langkah awal dari Pusbin SDI dalam memberikan layanan kepada masyarakat, investor dan para stakeholder terkait dalam menyediakan informasi investasi Infrastruktur yang Informatif, Komunikatif dan Terpercaya, selain itu juga sebagai media promosi kepada masyarakat dan para stakeholder terkait mengenai keberadaan dan fungsi dari Pusbin SDI.

Website yang menyediakan informasi investasi infrastruktur ini akan segera di launching dalam waktu dekat ini. Untuk saat ini SISDI dapat diakses pada alamat <http://bpksdm.pu.go.id/SDI/>.

Informasi yang disajikan berasal langsung dari seluruh wilayah Indonesia dan stakeholder terkait, karena itu kepercayaan dijamin. SISDI menyediakan informasi mengenai Pasar Konstruksi, Material dan Peralatan



Konstruksi dan Informasi Proyek baik yang akan tender, yang sedang berlangsung dan Proyek yang potensial. Selain itu SISDI juga menyediakan Forum Komunikasi Investasi sebagai sarana komunikasi tanya jawab dan diskusi tentang investasi konstruksi.

Untuk Informasi Pasar Konstruksi dan Potensi Pasar Konstruksi dibagi menjadi dua bagian yaitu nasional maupun Internasional selain itu dibedakan lagi menjadi dua yaitu Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi, dan kita juga dapat mengetahui sumber pendanaannya berasal darimana.

Tampilan Informasi yang ditampilkan sangat komunikatif, pengunjung website dapat memilih daerah dengan klik peta wilayah Indonesia yang telah disediakan. Informasi Profil Proyek strategis PU dan Profil Proyek Strategis Non PU, dalam menu tersebut terdapat beberapa pilihan diantaranya Proyek On Going, Proyek Proses Tender, Proyek Siap Tender, dan Proyek Potensial disajikan lengkap dan informatif dalam bentuk tabel berikut disertakan lokasi proyek, nilai proyek dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk informasi Material dan Peralatan Konstruksi terdapat beberapa menu yang bisa dipilih seperti Lokasi Material dan Alat Berat, pada menu ini kita dapat melihat sebaran material dan alat-alat berat di seluruh wilayah Indonesia, data yang ditampilkan disini berupa peta yang sudah diberi tanda penyebaran material dan alat-alat berat pada propinsi yang kita pilih.

Apabila kita ingin mencari Informasi mengenai Alat Berat di seluruh Indonesia pada website tersedia menu Ketersediaan Alat Berat, Potensi Material Konstruksi, dan Kebutuhan Alat Berat yang ditampilkan dalam bentuk peta wilayah Indonesia, kita cukup memilih atau klik salah satu wilayah maka akan muncul data yang diinginkan sesuai dengan wilayah yang dipilih. Untuk Informasi mengenai Material, SISDI mengelompokkannya menjadi tiga menu yang terdiri dari

Kebutuhan Material, Potensi Kebutuhan Material dan Potensi kebutuhan Alat Berat yang juga ditampilkan dalam bentuk peta wilayah Indonesia seperti menu mengenai Alat Berat.

Dalam SISDI kita juga dapat melihat berita terbaru tentang kegiatan Pusbin SDI serta agenda kegiatan Pusbin SDI yang akan datang, serta masih banyak lagi Informasi yang dapat diakses dan di explore dari website SISDI ini.

Meski demikian usaha yang dilakukan Pemerintah ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Akan sulit bagi Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi untuk dapat menyediakan informasi dan

merumuskan keseimbangan kebutuhan serta ketersediaan material dan peralatan konstruksi, jika masyarakat jasa konstruksi tidak turut serta berkontribusi di dalamnya. Untuk itulah masukan demi perbaikan SISDI ke depan sangat dinantikan.

Pada akhirnya dengan adanya SISDI ini diharapkan dapat membantu masyarakat, investor serta stakeholder terkait dalam mencari informasi mengenai Investasi Infrastruktur dan kedepannya SISDI diharapkan dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai Informasi Investasi Infrastruktur. (Ggh)





DUKUNGAN INDONESIA BAGI PALESTINA

Upaya pemenuhan Komitmen Indonesia untuk Program Pembangunan Kapasitas Palestina dalam Kerangka *New Asian African Strategic Partnership (NAASP) Capacity Building Programs for Palestine* tanggal 14 -15 Juli 2008, diimplementasikan berupa program pelatihan kepada 1000 orang aparat pemerintah Palestina selama 5 tahun (2008 - 2013).

Pada skala dunia internasional, hasil kesepakatan *NAASP Capacity Building for Palestine Coordinating Unit Meeting* yang dilaksanakan di Amman, Yordania tanggal 2-3 Desember 2010 dipaparkan bahwa dalam kurun waktu 2008 - 2010, Indonesia telah melatih 126 warga Palestina. Sementara itu keseluruhan negara NAASP dari Asia yang memiliki komitmen dan berada di bawah

koordinasi Indonesia telah melatih 940 warga Palestina. Lebih lanjut, negara NAASP dari Asia yang memiliki komitmen dan berada di bawah koordinasi Palestina, khususnya Turki, telah melatih 722 warga Palestina. Warga Palestina yang telah mendapat pelatihan pembangunan kapasitas dari negara-negara NAASP berjumlah 1662, masih jauh di bawah target 10.000 warga Palestina.

Hingga kini, Palestina masih memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Bulan September 2011, Presiden Palestina Mahmud Abbas meminta secara resmi kepada PBB untuk mengakui Palestina sebagai negara anggota penuh di PBB. Abbas menyerahkan sebuah aplikasi formal untuk Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Permintaan Abbas sendiri telah didukung lebih dari 120 negara yang telah mengakui negara Palestina.

Palestina terus berupaya untuk mendapatkan pengakuan keanggotaan di PBB, meskipun ada usaha-usaha diplomatik untuk membujuk Palestina menghentikan upaya tersebut. Palestina disarankan untuk memulai lagi pembicaraan perdamaian dengan Israel. Dalam Lokakarya Evaluasi dan Identifikasi Program Pembangunan Kapasitas bagi Palestina tanggal 1-2 Des 2011 di Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung, disampaikan mengenai beberapa arti penting tahun 2011 bagi perkembangan situasi di Palestina dan pelaksanaan program pembangunan kapasitas bagi Palestina oleh Indonesia. Arti penting tersebut berupa dukungan Indonesia bagi aplikasi Palestina untuk menjadi anggota PBB, keanggotaan Palestina di UNESCO, kunjungan ke Yordania dan Palestina dalam upaya pemenuhan komitmen program pelatihan, keikutsertaan peserta Palestina dari wilayah Gaza, serta peningkatan jumlah peserta pelatihan demi pemenuhan komitmen pada tahun 2012-2013.

Indonesia merencanakan untuk melakukan upaya percepatan implementasi pembangunan kapasitas Palestina demi mengejar target 1000 warga Palestina hingga tahun 2013. Langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan upaya percepatan tersebut antara lain melalui *e-learning* dan melaksanakan pelatihan di negara ketiga. Juga dipertimbangkan kemitraan dengan swasta, kalangan akademik, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Selama kurun waktu 5 tahun tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pembinaan Konstruksi memberikan *Training on Project Cycle*



(*Planning, Appraisal and Management of Infrastructure Projects*) for the Officials of Palestine, dengan target peserta 100 orang aparat Palestina.

Tujuan dari *Training on Project Cycle (Planning, Appraisal and Management of Infrastructure Projects)* for the Officials of Palestine adalah untuk meningkatkan kompetensi pejabat pemerintah Palestina yang terlibat secara langsung dalam proses perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Dengan pengetahuan dan wawasan yang diberikan diharapkan dapat mendukung peserta untuk menjadi pejabat profesional yang mampu melakukan perencanaan yang benar, menilai kelayakan sebuah proyek, dan menerapkan manajemen proyek modern, sehingga dapat menyelesaikan proyek tepat waktu, berkualitas tinggi, dengan biaya yang sesuai dengan perencanaan.

Peserta pelatihan merupakan pegawai pemerintah Palestina yang mempunyai kualifikasi : diusulkan oleh pemerintah Palestina; terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada proyek-proyek infrastruktur; lulusan teknik sipil atau yang setara serta mempunyai pengalaman kerja dalam pengembangan infrastruktur minimal 5 tahun.



Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2009 mengadakan pelatihan tersebut dan direncanakan diikuti oleh 20 orang peserta Palestina tiap tahunnya. Realisasinya, tahun 2009 terdapat 12 peserta, tahun 2010 terdapat 10 peserta dan tahun 2011

terdapat 20 peserta. Pada tahun 2012 akan dilakukan 2 kali pelatihan (April dan Desember) dan masing-masing diikuti oleh 20 peserta.

Pengajar tetap terdiri dari tenaga ahli yang telah mendapat sertifikasi pelatihan *Project Cycle di Bradford University England*, yang diwakili oleh para tenaga ahli anggota Yayasan Pendidikan INKINDO, Praktisi dari Kementerian Pekerjaan Umum, Pengajar Tamu dari *Islamic Development Bank (IDB)*, maupun narasumber dari kunjungan lapangan *Road Project, Building Project dan Water Project*. *** (MH dari berbagai sumber)



INDONESIA TIDAK SEPERTI YANG SAYA BAYANGKAN !!!

Berikut wawancara Redaksi Buletin BP Konstruksi,
dengan salah seorang peserta Project Cycle Palestina,
Sahar Allan, 27 tahun seorang Sarjana Teknik
yang bercerita tentang kehidupan dan
penilaiannya tentang Indonesia.

Redaksi (R) :

Apa yang pertama kali terbesit
dipikiran Anda tentang Indonesia ?

Sahar Allan (SA) :

Sebelumnya saya datang ke Indonesia,
saya berfikir sempit tentang Indonesia,
saya belum tahu sama sekali tentang
Indonesia, saya berfikir Indonesia tidak
ada pembangunan, tidak memiliki
kekayaan, juga sempat terbesit tentang
Afganistan, apa Indonesia seperti
Afganistan? Ternyata sama sekali jauh
dari yang saya pikirkan, saya kagum
dengan pembangunan yang dilakukan
oleh Indonesia, banyak gedung-gedung
tinggi seperti di Dubai, saya jadi teringat
Dubai, Jakarta seperti Burj Dubai ada
jembatan suramadu. Banyak sekali Film
India di Negara kami, tidak ada film
Indonesia, jadi kami lebih tahu tentang
India, di Indonesia ternyata tipe
wajahnya beragam, ada yang seperti
China, Jepang, Eropa, dll. Selain
mayoritas disini muslim namun terdiri
dari beragam agama juga. Selain itu
Indonesiaramah.

R : Bagaimana kondisi Palestina
sekarang ?

SA : Menakutkan, dan sangat kompleks,
di jalan selalu ada check point untuk
melapor, pergerakan kami sangat tidak
bebas, kami tak bisa pergi kemana yang
kita mau. Seperti ke mesjid Al Aqsa, ke
laut, sangat dibatasi. Lebih mudah
ketika kami pergi ke Indonesia, daripada
kami beres berpergian di dalam Negara
kami sendiri. Situasi politik yang kacau



yang menyebabkan kami jadi seperti ini.
Selain itu, kami sangat terbatas dengan
air minum, hanya untuk minum kami
harus membayar, kami harus memiliki
banyak uang, dalam satu bulan kami
hanya diberi 5 kali kesempatan untuk
mengisi tangki air, itu pun dibatasi
sekitar 30 liter per bulan kami harus
menghemat.

R : Setelah di Indonesia bagaimana
perasaanmu sekarang ?

SA : Sangat campur aduk perasaan saya
sekarang senang sedih bingung, karena
berbeda dengan keadaan di Negara
kami, dari kebiasaan, jenis makanan,
pakaian dan lain-lain. Disini pada saat
makan selalu ada nasi, kami makan
dengan roti, termasuk cara mengemudi
di jalan, lalu saya dapat melihat
hamparan tanah hijau, sawah, yang

jarang kami lihat disana. Setiap hari
disana kami selalu dalam ketakutan,
kami selalu dibayang-bayangi Israel. Lalu
kami pergi ke sini, sungguh berbeda.

R : Dalam perjalanan yang sedang
dilakukan ke Indonesia kali ini, apa yang
anda dapatkan ?

SA : Hal yang ingin saya bawa dari
perjalanan yang saya lakukan ke
Indonesia yaitu bagaimana seharusnya
saya mendapatkan ilmu dalam me-
manage proses pembangunan yang
efektif dengan sedikit biaya namun bisa
maksimal hasilnya. Bagaimana
seharusnya kami membangun
lingkungan di Negara kami seperti di
Indonesia.

R : Apa impian anda di masa yang akan
datang ?

SA : Mimpi saya adalah mimpi rakyat
Palestina. Kami ingin Israel segera hilang
dan pergi dari tanah kami, kami ingin
kehidupan yang bebas tanpa
keterbatasan yang saat ini menimpa
kami, keluarga kami ingin menjalani
kehidupan yang normal seperti di sini
(Indonesia). Selain itu masih banyak
mimpi-mimpi kami dan keluarga kami
yang saat ini selalu hidup dalam tekanan,
saya ingin melanjutkan sekolah saya
hingga program doctoral, saya ingin
membangun negeri saya.

R : Kami berharap sama dan doa kami
untuk kalian di Palestina. Terima kasih
Sahar atas waktumu. (dnd)

Sukseskan



KONSTRUKSI INDONESIA 2012



PAMERAN DAN SEMINAR KONSTRUKSI INDONESIA 2012

Parkir Timur Senayan, 29 November - 02 Desember 2012



Kementerian Pekerjaan Umum



Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi

Organized by INMARK Group



www.inmarkcomm.com



www.inmark-event.com

Ikuti dan Sukseskan



ConBuild[®] Mining Indonesia 2012

2nd International Trade Fair for Construction, Building & Mining -
Machinery, Equipment, Materials, Vehicles, Technology & Services

2 - 5 May 2012
Jakarta International Expo (JI Expo), Kemayoran
Jakarta, Indonesia



Kementerian Pekerjaan Umum